

**STUDI PENGARUH ASPEK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT DESA PENYANGGA TERHADAP UPAYA
KELESTARIAN TAMAN NASIONAL KELIMUTU**

(Studi Kasus Desa Saga, SPTN Wilayah II)

***STUDY OF THE INFLUENCE OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
ASPECTS OF BUFFER VILLAGE COMMUNITIES ON SUSTAINABILITY
EFFORTS OF KELIMUTU NATIONAL PARK
(Case Study of Saga Village, SPTN Region II)***

Stella Giri¹⁾, Maria M. E. Purnama²⁾, Fadlan Pramatana³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

²⁾ Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

³⁾ Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

*Email: stellagiri56@gmail.com

ABSTRACT

Kelimutu National Park, located in Ende Regency, East Nusa Tenggara, is the smallest national park in Indonesia, covering an area of 5,356.5 ha. The park faces various challenges from the people of Saga Village, including coffee plantations, traditional woodcutting, free-range livestock grazing, and other activities within the park. This study aims to analyze the impact of economic, social, and cultural aspects of the surrounding village community on the conservation efforts of Kelimutu National Park. The research was conducted in Saga Village from August to September 2023 using a descriptive qualitative method with snowball sampling technique. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that economic conditions affect the level of community participation in conservation. Those in difficult economic situations tend to participate less in conservation efforts as they focus on daily survival, while more economically stable individuals have more time and resources to engage in conservation activities. Social aspects influence consumption patterns and environmental behavior, where values and social norms play a significant role in shaping consumption patterns. Cultural aspects are also crucial in preserving local traditions related to environmental sustainability, where cultural values and practices can either support or hinder conservation efforts. Communities with strong conservation-supporting cultural traditions are generally more active in protecting their surrounding environment.

Keywords: Sustainability; economic aspect; social aspect; cultural aspect.

1. PENDAHULUAN

Taman nasional Kelimutu terletak di bagian tengah pulau Flores, tepatnya di

kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kawasan Taman Nasional Kelimutu merupakan taman nasional dengan luas terkecil di Indonesia, yaitu 5.356,5 ha.

Kawasan Taman Nasional Kelimutu terletak pada 5 kecamatan dan 24 desa penyangga.

Masyarakat yang tinggal di desa penyangga merupakan faktor penting dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan. Model kawasan penyangga pada dasarnya terdiri dari aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar kawasan berupa pembagian kawasan penyangga menjadi sub kawasan. Keberadaan dan fungsi kawasan penyangga memerlukan kemampuan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan tidak mengganggu fungsinya sebagai pelindung inti taman nasional. (Ormsby dan Kaplin, 2005, dalam Hafid, 2017) yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap Taman nasional akan mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi antara masyarakat dengan taman nasional. Interaksi ini dapat berdampak positif terhadap masyarakat dalam bentuk manfaat dan taman nasional yang selanjutnya akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan taman nasional tersebut.

Terwujudnya kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan, memperkuat ekonomi rakyat, mendukung perekonomian nasional bagi kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan, maka kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan haruslah betul-betul melibatkan dan menyentuh langsung masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang berada di salah satu desa penyangga Taman nasional Kelimutu dalam kaitanya terhadap upaya kelestarian Taman nasional Kelimutu.

2. METODOLOGI

2.1 Alat dan bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera Handphone, perekam suara, laptop, alat tulis menulis dan microsoft word. Adapun bahan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan wawancara.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik *snowball sampling*. Teknik *Snowball Sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dengan kata lain *snowball sampling* metode pengambilan sampel dengan secara berantai (multilevel). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif, meliputi komponen-komponen, pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Saga merupakan sebuah wilayah pemukiman adat di Kabupaten Ende yang luasnya 11.06 km² dengan sebagian wilayah termasuk kawasan Taman Nasional Kelimutu. Letak desa adat ini cukup dekat dengan ibukota kecamatan, yaitu sekitar 13 km dan sekitar 25 km dari pusat.

Desa Saga memiliki batas wilayah pada sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Adat Ndito dengan tanda batas di Lowo Nipa/sungai, sebelah timur berbatasan dengan Saga su/watu buru, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Soko-ria dengan tanda batas di bukit kecil/ wawo tune, berbatasan dengan wilayah adat Wolomasi dengan batas yaitu jalan tani leke-peri beda, kali kering, Lowo nebo, hingga ke Aesira (jalan tikus) dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Ata loko, Roa dan desa Sipijena.

Desa Saga terletak pada ketinggian sekitar 698 mdpl, sehingga daerah cukup dingin. Lingkungan fisik Desa Adat Saga berbukit-bukit, yang dikelilingi pohon-

pohon yang rindang. Kondisi jalan dari Kota Ende menuju Desa Roa yang merupakan akses pertama menuju Desa Adat Saga cukup baik, dan kondisi jalan dari Desa Roa ke menuju Desa Adat Saga juga cukup baik dan bagus walaupun sedikit tanjakan dan berkelok-kelok.

Desa Saga memiliki 227KK dengan total KK miskin sebanyak 152KK. Jumlah penduduk masyarakat desa Saga 730 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin

Menurut usia	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-5	25	21	46
6-10	29	24	53
11-15	33	39	72
16-20	34	23	57
21-25	22	16	38
26-30	20	20	40
31-35	14	20	34
36-40	24	20	44
41-45	25	23	48
46-50	25	33	58
51-55	24	24	48
56-60	16	33	49
61- keatas	50	93	143
Total jumlah	341	389	730

(Sumber: Rekapitulasi Data Kependudukan Saga, 2022)

3.2 Konflik Awal Masyarakat Desa Saga dan TNK

Konflik tapal batas kawasan hutan bermula sejak kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan Taman nasional Kelimutu lewat SK Menhut No. 679/kpts-11/1997, tanggal 10 Oktober 1997, seluas 5.356,50 Ha. Sebelumnya kawasan ini berstatus cagar alam dan taman wisata alam sejak tahun 1984. Sesuai dengan SK Dirjen PHKA No.16/Kpts/DJ-V/2001 TNK terbagi menjadi empat zona, yakni Zona Inti seluas 350.5 hektar dan Zona Rimba seluas 4.351,5 hektar. Selain itu terdapat Zona Pemanfaatan Intensif seluas 96,5 hektar dan Zona Rehabilitasi seluas 558 hektar. Sebagai kawasan konservasi ia harus bebas dari siapapun kecuali melalui izin dan pengawasan pemerintah. Sebagai kawasan konservasi, maka ia harus bebas dari

siapapun kecuali melalui izin dan pengawasan pemerintah. Oleh Kementerian Kehutanan, ditetapkanlah tapal batas kawasan Taman Nasional Kelimutu untuk memudahkan kontrol. Maksud baik mengkonservasi taman nasional ini berbenturan dengan keberadaan Masyarakat Adat yang berdiam dan telah puluhan tahun berladang di kawasan ini. Tak aneh jika di dalam kawasan ini terdapat tanaman kopi, vanili, kakao dan lainnya sudah ada sejak puluhan tahun.

Konflik berawal sejak tahun 2007 lalu petugas taman nasional Kelimutu mendatangi Bapak Andreas Pole yang baru saja pulang membersihkan kebun kopi miliknya. Kepada petugas, bapak Andreas menjelaskan bahwa kebun kopi miliknya turun-temurun, sudah ada sebelum disahkannya kawasan konservasi Taman Nasional Kelimutu. Dia mengaku hanya

melanjutkan pekerjaan orang tua yang membuka kebun kopi pemberian Mosalaki (tetua adat) untuk digarap.

Komunikasi dengan komunitas adat selama ini bertujuan untuk melestarikan aset Taman Nasional Kelimutu, yaitu konservasi kawasan hutan. Selama belum ada peraturan pengganti maka masyarakat tetap tidak diperbolehkan melakukan aktivitas berkebun di dalam areal Taman Nasional Kelimutu. Hal ini berpatokan pada UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, namun tetap menghargai komunitas adat yang pada akhirnya memberikan kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan hasil kopi yang sudah ditanam, selama bukan dari hasil tanaman baru apalagi membuka lahan kebun di dalamnya.

Sesuai dengan Peraturan Menhut No. 37/2007 & No 13/2010 tentang HKm (Hutan Kemasyarakatan) dan HTR (Hutan Tanaman Rakyat). Kedua mekanisme ini merupakan koridor legal dimana masyarakat sekitar hutan dapat mengelola hutan negara sesuai aturan perundangan. Kegiatan ini dapat dilakukan lewat masa kontrak 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama tidak merubah fungsi hutan yang ada.

3.3 Kondisi Masyarakat Desa Saga

3.3.1 Kondisi Ekonomi Masyarakat

Pada umumnya masyarakat pedesaan hidup dari hasil pertanian, sebagian kecil masyarakat bekerja sebagai PNS dan lain-lain. Pada utamanya masyarakat Saga adalah petani lahan kering, yang menanam jagung, coklat, cengkeh, kemiri dan kopi. Selain itu juga mereka menanam padi ladang yang digunakan sebagai upacara adat Pera Bara. Ladang berpindah merupakan pola pertanian tradisional yang diterapkan secara evolutif oleh masyarakat Saga dalam mewujudkan ketahanan pangan memberi kesempatan lahan-lahan yang telah digarap menjadi subur kembali dan hasilnya besar.

Masyarakat desa di sekitar taman nasional khususnya masyarakat pemberdayaan termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang memiliki perekonomian rendah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat bergantung pada alam contohnya hasil hutan di sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok pemberdayaan, masyarakat disebut memiliki perekonomian rendah karena kurangnya akses ke pasar dan peluang ekonomi lainnya. Hal ini dapat membatasi potensi penghasilan ekonomi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan adanya konflik kepentingan antara pihak pengelola yang ingin menjaga kelestarian ekosistem dengan masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan ekonominya.

Masyarakat di Saga memiliki kebun kopi yang luasnya ± 21 ha yang berada di dalam kawasan Taman nasional Kelimutu. Kebun kopi dengan luas ± 21 ha ini merupakan milik warga setempat yang sejak dahulu telah berkebun.

Nama kemitraan :Pemberdayaan Masyarakat Adat Saga
Berdirinya kemitraan :Sejak 2018
Jumlah Anggota : 55 Kk
Luas kebun : ± 21 ha
Jenis tanaman kebun : Kopi

Barang yang dihasilkan : Kopi bubuk dan souvenir dari biji kopi (gelang, Rosario, Tasbih, dll).

Kelompok Masyarakat Adat (KMA) Saga merupakan salah satu entitas yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar TN Kelimutu.

1. Latar belakang dan fokus kemitraan:
 - a. Program kemitraan konservasi yang dilaksanakan oleh TN Kelimutu bertujuan untuk mengatasi konflik tenurial di sekitar kawasan taman nasional.

- b. Kemitraan ini melibatkan kelompok masyarakat adat Saga dengan fokus pada dua hal yaitu mewujudkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan anggota KMA Saga.
2. Upaya pemberdayaan:
 - a. Taman Nasional Kelimutu telah berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan KMA Saga melalui kemitraan.
 - b. Beberapa upaya pemberdayaan meliputi:
 - i. Modal manusia: peningkatan kapasitas anggota KMA Saga.
 - ii. Modal alam: pengelolaan komoditas pasca panen.
 - iii. Modal sosial: membangun kerjasama dan jaringan.
 - iv. Modal fisik: pengembangan infrastruktur.
 - v. Modal finansial: peningkatan akses ke sumber daya keuangan.
3. Analisis keberlanjutan penghidupan:
 - a. Berdasarkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, perlu dibahas peningkatan intensifikasi lahan kelola milik KMA Saga di luar kawasan.
 - b. Lahan kelola di zona tradisional TN Kelimutu perlu beralih pada pengembangan komoditas lain berbasis non lahan yang lebih ramah lingkungan, namun memiliki produktivitas yang tinggi.

Jadi, KMA Saga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Taman Nasional Kelimutu.

Berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan ketua kelompok pemberdayaan masyarakat yakni Bapak Alexander Solo Sina(63th), beliau menceritakan bahwa rata-rata pekerjaan utama anggota Pemberdayaan Masyarakat Adat Saga adalah petani cengkeh, kakao dan kemiri. Pendapatan dari hasil tani mereka kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan

primer sehari-hari mereka. Oleh karena itu untuk kebutuhan lainnya mereka melakukan pekerjaan sampingan seperti tergabung dalam pemberdayaan masyarakat. Namun, penghasilan yang didapatkan hanya tergantung dari pesanan konsumen. Pemasaran yang mereka lakukan juga terbatas. Hal ini yang menjadi permasalahan masyarakat pemberdayaan di bidang ekonomi.

Menurut Bapak Alex selaku ketua kelompok pemberdayaan, anggota-anggota kelompok pemberdayaan tidak memiliki kreatifitas yang cukup untuk dapat mengelola hasil kopi yang dimiliki karena rata-rata pendidikan anggota hanya lulusan SMP dan SMA. Desa Adat Saga sendiri hanya terdapat fasilitas pendidikan berupa TK (Taman Kanak-Kanak) Wolomasi dan SDK (Sekolah Dasar Katolik) Saga. Pada sekitar tahun 2000-an di Desa Adat Saga terdapat dua Sekolah Dasar (SD) yaitu SDI Saga dan SDK Saga, namun disalah satu SD yaitu SDI Saga mengalami kekurangan murid sehingga digabungkan dengan SDK Saga. Rata-rata masyarakat yang merantau ke kota hanya untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMP dan SMA, ada pun yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi tetapi kebanyakan mencari kerja di tanah rantau. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan.

Nugroho (2021) menyatakan bahwa pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat memiliki keterampilan yang kurang. Lebih lanjut (Munanura 2014 dalam Nugroho & Wibowo 2021) menyatakan bahwa bukan hanya ketahanan pangan dan pendapatan yang mendorong ketergantungan masyarakat terhadap hutan namun juga pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan memiliki peran penting dalam membentuk tingkat kreativitas masyarakat lokal. Pendidikan yang berkualitas memberikan akses ke pengetahuan dan keterampilan yang

diperlukan untuk mengembangkan ide-ide baru dan solusi kreatif terhadap berbagai masalah. Sementara itu, kesehatan yang baik meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, memungkinkan mereka untuk lebih fokus dan berdaya dalam mengekspresikan kreativitas mereka.

Tabel 4.3.2 Data pendidikan terakhir Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Adat Saga

Tingkatan	Jumlah
TK	-
SD	7
SMP	17
SMA	31
AKADEMI	-
SARJANA	-

(Sumber: Data dasar kerjasama antara Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Adat Saga dan Taman Nasional Kelimutu).

Sejak 2018 Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Adat Saga memutuskan untuk bekerja sama dengan Taman nasional Kelimutu yang kemudian disahkan oleh kepala desa dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Saga Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Adat Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende. Seiring berjalannya waktu, untuk meminimalisir permasalahan ekonomi masyarakat, pihak Taman nasional Kelimutu memberikan bekal untuk peningkatan ekonomi masyarakat berupa bantuan fasilitas, bantuan dana dan pelatihan peningkatan kreativitas kepada anggota kelompok pemberdayaan. Hasilnya baik karena adanya peningkatan kreatifitas oleh anggota kelompok seperti pemasaran kopi bubuk dan souvenir hingga saat ini bisa dipasarkan hingga Jakarta, bahkan pada saat event tertentu pernah dikirim ke luar negeri.

Melalui peningkatan kreativitas melalui pelatihan, masyarakat dapat

mengembangkan cara-cara baru untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya membantu masyarakat mengatasi krisis ekonomi, tetapi juga merangsang keterlibatan aktif mereka dalam upaya kelestarian taman nasional. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat dalam upaya kelestarian taman nasional juga dapat membawa manfaat bagi pihak taman nasional itu sendiri. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam, pihak taman nasional dapat memperoleh lebih banyak dukungan dalam menjaga dan melindungi habitat serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Selain itu, dengan masyarakat yang terlibat aktif, taman nasional dapat memperluas jangkauan upaya konservasi dan pemantauan lingkungan, sehingga memperkuat posisi taman nasional dalam menjaga kelestarian alam dan sebagai tujuan wisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara masyarakat Saga dan pihak taman nasional Kelimutu menciptakan lingkungan dimana kedua belah pihak saling mendukung dan saling memperkuat dalam upaya pelestarian alam.

Selain mendapatkan hasil dari wawancara pada responden, penulis mengamati langsung bahwa masyarakat Saga yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap SDA merupakan masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan tidak memiliki pekerjaan lain selain mengambil SDA yang tersedia di hutan. Sementara itu, Pemanfaatan SDA dengan tingkat ketergantungan sangat rendah merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap dan memiliki lahan pertanian sendiri sehingga pendapatan yang berasal dari SDA hanya sebagai pendapatan tambahan. Terbukti dengan masih adanya masyarakat masih terlibat dalam kegiatan seperti pengambilan kulit kayu manis,

penggembalaan liar, pengambilan kayu bakar dan pengambilan hasil hutan bukan kayu di dalam hutan. Hal ini terjadi karena:

1. Ketergantungan Mata Pencarian Tradisional:

Masyarakat mungkin memiliki mata pencarian tradisional yang tergantung pada sumber daya alam di dalam hutan lindung. Aktivitas seperti pengambilan kulit kayu manis dan penggembalaan liar mungkin dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan budaya mereka. Dengan kata lain, hutan merupakan suatu jaminan bagi ketahanan pangan atau yang dikenal sebagai food security. Ciri lain dikemukakan dari hasil penelitian Pudjorahardjo (1987) dan Santoso & Hartono (2022) yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang berada di tepian hutan berpola nafkah utama sebagai buruh tani yang memerlukan lahan garapan dan memerlukan lapangan pekerjaan lain untuk jadi tambahan dalam memenuhi tuntutan hidup individu dan keluarganya. Tidak jarang pihak pengelolaan juga menemukan bukan hanya masyarakat bermata pencarian tradisional saja yang melakukan aktifitas dalam hutan. Aktivitas seperti mencari makanan tambahan atau bahan bakar dapat menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak bagi sebagian masyarakat, terlepas dari pekerjaan utama mereka.

2. Kurangnya Kesadaran Lingkungan:

Tingkat kesadaran lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi cara mereka memandang kegiatan yang dilakukan di hutan lindung. Jika pemahaman tentang dampak negatif terhadap keberlanjutan hutan rendah, masyarakat mungkin kurang memperhatikan konsekuensi ekologis dari aktivitas mereka. Peneliti juga mencatat bahwa kegiatan ilegal di hutan, termasuk pengambilan kayu bakar atau mencari makanan secara tidak sah, tidak

selalu terbatas pada masyarakat lokal yang bermata pencarian tani. Bahkan, beberapa pegawai atau orang yang memiliki pekerjaan tetap juga terlibat dalam aktivitas ilegal di hutan. Hal ini menyiratkan pentingnya kesadaran lingkungan dan penegakan hukum yang adil dan tegas dalam menjaga kelestarian hutan.

3. Ketidaktersediaan Alternatif Mata Pencarian:

Keterlibatan dalam aktivitas eksploitatif di dalam hutan lindung juga dapat dipicu oleh ketidaktersediaan alternatif mata pencarian yang memadai. Jika masyarakat tidak memiliki pilihan yang berkelanjutan, mereka cenderung melibatkan diri dalam praktik-praktik yang dapat merugikan hutan. Noveria & Malamassam (2015) dalam Oktadiani (2018), lebih lanjut mengatakan bahwa hal utama yang perlu disadari sebelum melakukan inisiatif mata pencarian alternatif adalah pentingnya pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi ekonomi sosial dan budaya masyarakat sekitar hutan termasuk kebiasaan dan pandangan yang berkaitan dengan kegiatan mata pencarian alternatif ini.

3.3.2 Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat

3.3.2.1 Struktur Pemerintahan Formal Desa Saga

Struktur pemerintahan Desa Saga seperti halnya dengan daerah lain yang ada di Indonesia pemerintahan formal yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa beserta jajarannya yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara, kaur-kaur dan BPD beserta anggotanya. Desa Adat Saga terdiri dari 3 dusun/lingkungan, 4 rukun warga (RW) dan 9 rukun tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 730 jiwa dengan kepadatan penduduk ±60 orang/km (BPS Kabupaten Ende 2022).

3.3.2.2 Struktur Pemerintahan Adat (Tradisional) Desa Saga

Desa Adat Saga memiliki kesatuan struktur adat Saga yang dilihat dari kehidupan sehari-harinya:

1. Mosalaki Pu'u (ada 2 orang), yang berperan sebagai pemimpin umum serta pelaksana upacara adat Embu Wolo dan Embu Limbu
2. Mosalaki Ria Bewa berperan sebagai hakim adat dan hakim perdamaian di kampung (satu orang)
3. Mosalaki Tuke Sani berperan untuk membantu mosalaki pu'u dengan memiliki peran khusus yaitu menguasai setiap marga (Embu) masyarakat secara turun temurun
4. Mosalaki Koe Kolu berperan sebagai pengurus upacara membuka lahan dan penanaman di kebun.
5. Mosalaki Wela Wawi berperan untuk membunuh hewan kurban yang telah ditentukan untuk dipersembahkan kepada leluhur atau nenek moyang
6. Mosalaki Wunu Koli berperan membagikan daging dari hewan kurban yang telah disembelih oleh mosalaki yang bertugas dalam sebuah upacara adat
7. Mosalaki Da'i Ma'u Enga Nanga (Kebesani) berperan apabila ada tembok pengaman rumah adat yang runtuh maka mereka yang akan menyiapkan babi dan Pati Watu Leka Ata Laki. Dengan kata lain berperan sebagai penjaga batas wilayah, memberikan peringatan serta menyelesaikan penentuan yang benar berkaitan dengan batas wilayah.
8. Mosalaki Kago Kao berperan untuk membagi emping (salah satu makanan pantangan sementara) saat upacara adat

Masing-masing struktur mosalaki diatas mempunyai hak sehingga mereka dibebani kewajiban untuk membuat rumah adat dan umumnya semua mosalaki itu memiliki

tanggung jawab yang sama terhadap wilayah adat Saga.

3.3.2.3 Budaya, Etnik dan Ritual Adat Masyarakat

Adat adalah aturan-aturan tentang kehidupan manusia yang disepakati dalam suatu penduduk dalam suatu daerah tertentu untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakatnya sebagai kelompok sosial (Mashuri, 2012). Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat istiadat, upacara, dan sebagainya, yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dalam wujud perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat. Kepercayaan erat hubungannya dengan upacara-upacara religius, dan menentukan tata ukur dari pada unsur-unsur acara serta rangkaian alat-alat yang dipakai dalam upacara itu (Koenjaraningrat, 1974).

Aspek sosial yang berkaitan erat dengan budaya masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kelestarian alam. Budaya masyarakat mencakup nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, dan norma-norma yang membentuk cara pandang dan perilaku mereka terhadap lingkungan. Misalnya, dalam masyarakat yang menghargai dan menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari warisan budaya mereka, kesadaran akan pentingnya pelestarian alam cenderung tinggi. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif juga dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian alam (Sartini 2018).

Setiap masyarakat memiliki kehidupan sosial yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Hal itu dapat dilihat dari adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat merupakan bagian integral dari kebudayaan suatu masyarakat yang memainkan peran penting sebagai pengatur, pengendali, dan pemberi arah terhadap

perilaku dan tindakan manusia dalam masyarakat. Melalui adat istiadat, norma-norma, nilai-nilai, dan tradisi turun-temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, membentuk kerangka sosial yang mengatur interaksi antarindividu dan memelihara kesinambungan budaya masyarakat (Nugroho 2020).

Desa Adat Saga merupakan salah satu yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadat yang dapat dilihat dari penggunaan bahasa dan upacara-upacara adat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Saga menggunakan bahasa Lio sebagai bahasa pengantar yang dominan. Bahasa Lio tidak hanya menjadi alat komunikasi utama di berbagai konteks sosial, tetapi juga memegang peranan penting dalam mempertahankan identitas budaya dan warisan leluhur masyarakat Saga.

Pengaruh budaya masyarakat terhadap kelestarian alam juga tercermin dalam praktik-praktik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, adat-istiadat yang mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan atau upacara-upacara adat yang bertujuan untuk mempersembahkan penghargaan kepada alam. Praktik-praktik seperti ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem. Upacara-upacara adat di Desa Saga masih tetap dilakukan hampir sepanjang tahun mulai dari bulan April sampai dengan puncak acara adat di bulan september yang dinamakan upacara nggua (Pesta Besar). Wujud upacara masyarakat desa Adat Saga menyelenggarakan berbagai macam seremonial adat. Ritual adat di Desa Adat Saga, yang dalam bahasa lokal (Lio) biasa disebut nggua, adalah sebuah ritual yang bermakna dalam dan penuh syukur atas segala limpahan rezeki dari yang maha kuasa. dalam bahasa keseharian, bolehlah

kita sebut sebagai pesta panen, karena secara substansi adalah untuk mensyukuri hasil yang telah dicapai mereka setahun kebelakang.

Ritual adat diadakan bertahap disertai perjamuan makan bersama. Upacara-upacara tersebut disertai dengan tarian tradisi dan tabuhan gong. Ritual dibuka dengan kake'o (penanaman) yang ditandai dengan tenggo (bunyi gong menandakan pembukaan ritual adat) hingga pada puncak acara/ pesta besar (nggua). Setelah itu akan dimulai lagi ritual dari awal sehingga ritual-ritual adat berputar seperti lingkaran yang tidak ada habisnya.

Menurut bapak Maximus Wolo yang merupakan Mosalaki Embu Wolo mengatakan tingkatan strata sosial di wilayah permukiman Desa Adat Saga selalu memiliki kedudukan yang sama. Diantara para Mosalaki itu sendiri pembagian tugas dan wilayah kerjanya sudah sangat jelas. Oleh karena itu setiap Mosalaki tidak boleh mengambil hak dan kedudukan Mosalaki lain. Apabila hal itu terjadi maka akan terjadi perselisihan dan perkelahian antara sesama Mosalaki. Namun sejauh ini berdasarkan hasil wawancara belum terjadi hal yang demikian. Pada pelaksanaan upacara adat, jika salah satu dari Mosalaki belum hadir maka upacara adat tersebut tidak akan dilaksanakan sampai Mosalaki tersebut itu hadir. Hal ini juga terjadi di daerah lain seperti di Desa Adat Sade, Lombok, dalam jurnal Wahyudi, R. (2019) menyatakan bahwa "Kepatuhan masyarakat lokal terhadap adat sering kali merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor historis, sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun pengaruh modernisasi dan globalisasi dapat mengubah dinamika kepatuhan tersebut, banyak masyarakat lokal tetap mempertahankan nilai-nilai dan praktik adat sebagai bagian penting dari identitas dan warisan budaya mereka."

Adapun hewan yang dianggap sakral yaitu Anjing. Hewan anjing ini dianggap sakral karena menurut sejarah dan garis keturunan Dala Wolo, hewan anjing merupakan nenek moyang mereka. Sedangkan tumbuhan yang dianggap sakral adalah ubi (uwi), kacang (bue), dan emping. Tumbuhan-tumbuhan ini dianggap sakral karena pada saat ritual adat tertentu masyarakat Saga dilarang (pamali) makan ubi, kacang dan emping.

3.3.2.4 Aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan serta kelestarian sumber daya alam TNK

Aspek sosial yang terkait erat dengan budaya masyarakat memiliki dampak yang sangat penting terhadap kelestarian alam. Penelitian yang dilakukan oleh Adiwibowo dan Pradana (2020) *dalam* Safitri & Hadi (2022) menunjukkan bahwa nilai-nilai, norma-norma, dan praktik budaya masyarakat memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku dan sikap terhadap lingkungan. Misalnya, dalam masyarakat yang memiliki tradisi yang kuat dalam menjaga harmoni dengan alam, seperti masyarakat adat atau komunitas lokal yang menerapkan filosofi keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari, cenderung memiliki kesadaran lingkungan yang lebih tinggi.

Namun demikian, tidak semua aspek sosial dan budaya masyarakat mendukung kelestarian alam. Terkadang, adat-istiadat atau norma-norma yang sudah berakar kuat dalam masyarakat dapat menghambat upaya pelestarian alam. Misalnya, praktik-praktik tradisional yang merusak lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar untuk keperluan upacara atau perburuan hewan yang dilakukan tanpa pertimbangan keberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika kompleks antara aspek sosial, budaya, dan kelestarian alam dalam konteks masyarakat tertentu untuk

merancang strategi yang efektif dalam menjaga kelestarian alam (Setiawan 2021).

Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa masyarakat Adat Saga memiliki aturan atau hukum adat yang berlaku dalam mengelola tanah. Beberapa hukum adat yang berlaku di antaranya:

- a. Pembuatan rumah adat, kayu yang digunakan harus mai keli dua ngara. Kayu tersebut tidak sembarangan ditebang tetapi harus melalui nipi kobe pati atau hasil musyawarah bersama. Sehingga adanya kesepakatan untuk tidak menebang di dalam kawasan. Solusinya adalah menanam pohon yang menghasilkan kayu tersebut di luar kawasan agar bisa merawatnya dengan baik.
- b. Pire, semua ana kalo fai walu dilarang mengerjakan/ beraktifitas di kebun. Jika ada yang melanggar aturan tersebut, dikenakan sanksi berupa poi/tunu berupa babi satu ekor atau disesuaikan dengan pelanggarannya. Selain bermanfaat bagi masyarakat untuk beristirahat sejenak, pire juga bermanfaat bagi alam karena alam diberi kesempatan untuk bebas dari campur tangan manusia. Namun, pire ini hanya dilakukan pada bulan September saja pada saat menuju puncak Upacara Adat. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat kembali beraktivitas pada 11 bulan lainnya.
- c. Leka biri, larangan untuk menebang kayu di mata air atau di hutan yang dianggap rawan longsor sehingga untuk mencegah longsor tidak boleh ditebang kayunya.
- d. Demi uma langi pa pebi no ata rewo, larangan tidak boleh melewati batas wilayah. Jika terjadi pelanggaran akan dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Sanksinya apapun keputusan musyawarah.
- e. Uma langi pebi, ae naku fara. Aturan adat ini sangat bermanfaat karena

melarang masyarakat untuk memasuki kawasan Taman nasional Kelimutu sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan dan pencurian SDA yang berada di dalam kawasan.

Ternyata tidak semua pendapat dari peneliti terdahulu sesuai dengan realita yang terjadi di Desa Saga. Setiawan (2021) mengatakan bahwa, tidak semua aspek sosial dan budaya masyarakat mendukung kelestarian alam. Terkadang, adat-istiadat atau norma-norma yang sudah berakar kuat dalam masyarakat dapat menghambat upaya pelestarian alam. Namun yang terjadi di Desa Saga, masyarakat ternyata lebih patuh terhadap aturan adat yang berlaku secara turun-temurun. Selain itu, aturan adat juga sering kali memuat nilai-nilai kearifan lokal yang berhubungan dengan kelestarian alam. Masyarakat yang mengikuti aturan adat cenderung memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat. Dengan demikian, aturan adat bukan hanya sebagai panduan praktis dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang mendukung kelestarian alam secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan (Sartini, 2018) Keterkaitan kearifan lokal yang masih dilakukan masyarakat sangat berpengaruh pada kelestarian alam sehingga pengetahuan praktis dalam budaya lokal masyarakat tertentu memiliki peran dalam konservasi dan melindungi hutan serta sumber daya alam lainnya. Meskipun sebagian besar masyarakat patuh terhadap aturan adat yang berlaku, masih ada saja oknum-oknum yang melanggar aturan tersebut.

3.4 Upaya-upaya kelesarian alam berbasis masyarakat

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, memiliki andil yang sangat besar terhadap kelestarian

hutan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar dari mereka secara turun temurun hidup dan mengetahui secara jelas tentang bagaimana cara mengelola hutan tanpa merusak dan mengeksploitasinya. Namun, perladangan berpindah yang mereka lakukan dianggap sebagai tindakan yang tidak konservatif dan menjadi penyebab utama kerusakan hutan (Qodriyatun, 2020).

Sebelum penulis membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Taman nasional Kelimutu, berikut merupakan tantangan yang dihadapi oleh Taman nasional Kelimutu untuk seperti:

1. **Aktivitas Merugikan Lingkungan:** Meskipun ada keberlanjutan, beberapa individu atau kelompok dalam masyarakat mungkin terlibat dalam aktivitas yang merugikan lingkungan, seperti pengambilan kayu ilegal atau kegiatan penggembalaan liar. Ini dapat menimbulkan tantangan serius terhadap upaya kelestarian taman nasional.
2. **Ketidaksesuaian Kebutuhan Masyarakat dengan Aturan Pelestarian:** Ada kemungkinan bahwa kebijakan pelestarian yang diterapkan oleh taman nasional tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini dapat menyebabkan ketegangan antara masyarakat lokal dan pihak pengelola taman nasional.
3. **Ketergantungan yang Menyulitkan**
4. **Perubahan:** Masyarakat yang terlalu bergantung pada sumber daya alam tertentu mungkin sulit untuk beralih ke alternatif yang lebih berkelanjutan. Perubahan ini dapat menghadapi resistensi atau kesulitan, terutama jika tidak ada dukungan atau peluang yang jelas.

Kegiatan konservasi seringkali dihadapkan pada dua hal yang selalu dipertentangkan, yaitu pro-manusia atau

pro-lingkungan. Dalam pengelolaan kawasan konservasi, kedua hal tersebut dapat disatukan dalam satu konsep pengelolaan, yaitu pengelolaan kolaboratif. Masyarakat sekitar kawasan konservasi memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan kawasan konservasi melalui kearifan lokal dan aturan adat mereka (Eghenter dkk 2020).

Oleh karena itu langkah-langkah yang diambil oleh Taman nasional Kelimutu yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kemitraan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk menciptakan solusi bersama yang mengakomodasi kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Pandangan pihak pengelolaan Taman nasional Kelimutu sejalan dengan upaya yang diterapkan di Taman nasional Komodo menurut Praditya & Nurjannah (2018) mengatakan "Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam upaya pelestarian taman nasional merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem. Melalui keterlibatan mereka dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, masyarakat lokal tidak hanya memperkuat ikatan dengan alam, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan."

2. Pengembangan Alternatif Ekonomi

Diversifikasi sumber pendapatan masyarakat di sekitar hutan lindung, seperti agrowisata berkelanjutan, pengembangan kerajinan lokal, atau program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan lapangan kerja. Pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat penyangga taman nasional merupakan langkah yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan

dan kesejahteraan sosial (Wicaksono & Permatasari 2020).

3. Edukasi Lingkungan

Tingkatkan kesadaran lingkungan dan pemahaman tentang pentingnya pelestarian hutan melalui program edukasi bagi masyarakat lokal, terutama generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga kelestarian alam. Berdasarkan hasil penelitian penulis, upaya edukasi lingkungan ini yang paling penting untuk diimplementasikan kepada masyarakat lokal khususnya generasi muda karena ini merupakan suatu tantangan besar bagi pihak pengelolaan Taman nasional Kelimutu karena untuk mencapai kelestarian hutan perlu adanya partisipasi masyarakat yang tinggal dan menetap di kawasan sekitar hutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Prasetyo (2018) di Taman nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Mereka berpendapat bahwa "Edukasi lingkungan memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian taman nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi alam dan ekosistem. Melalui program edukasi yang terarah dan terintegrasi, masyarakat dapat memahami dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan serta memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk bertindak sebagai agen perubahan dalam menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada."

4. Penerapan Kebijakan yang Berkelanjutan

Implementasikan kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan data terkini tentang ekologi hutan serta kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang relevan. "Penerapan kebijakan yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian taman nasional. Kebijakan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang dapat menciptakan kerangka kerja

yang mendukung pelestarian alam yang berkelanjutan sambil memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dan kebutuhan pembangunan." (Astuti 2019).

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat

Pastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas ilegal seperti pembalakan liar atau penangkapan satwa liar, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup. Ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan "Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelestarian taman nasional. Melalui sistem pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terhadap aturan konservasi dan lingkungan, kita dapat mencegah kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol dan memastikan keberlanjutan ekosistem taman nasional untuk generasi mendatang." (Santoso & Hartono, 2022)

Melalui kombinasi langkah-langkah ini, pihak Taman nasional Kelimutu berharap dapat mencapai keseimbangan antara pelestarian hutan dan kebutuhan masyarakat, sambil memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan solusi yang berdaya tahan dan mempertahankan keberlanjutan hutan.

Setelah mengambil langkah-langkah di atas, pihak Taman nasional Kelimutu juga melakukan upaya-upaya yang melibatkan langsung masyarakat sekitar hutan/masyarakat desa penyangga. Upaya kelestarian alam berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan alam di sekitar mereka. Salah satu bentuk upaya ini adalah melalui pembentukan kelompok atau komunitas lokal yang fokus pada pelestarian

alam, seperti kelompok sukarelawan lingkungan atau kelompok pecinta alam.

Upaya-upaya kelestarian alam berbasis masyarakat (kegiatan) yang telah dijalankan oleh Taman nasional Kelimutu seperti:

a) Masyarakat Mitra Polhut (MMP)

Kerjasama antara pihak pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat lokal diyakini merupakan bagian yang penting untuk kelangsungan pengelolaan kawasan konservasi dalam jangka panjang. Kerjasama tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Khusus untuk peran serta masyarakat dalam pengamanan hutan telah disebutkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal ini menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan. Oleh karena itu untuk mengimplementasikan aturan ini, masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan hutan. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2014 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP).

Beberapa bentuk Partisipasi MMP, yaitu:

1. Pemberitahuan (Informing): Hasil yang diputuskan oleh orang luar diberitahukan kepada masyarakat. Komunikasi terjadi satu arah dari luar ke masyarakat setempat;
2. Pengumpulan Informasi (Information Gathering): Masyarakat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang luar. Komunikasi searah dari masyarakat ke luar;
3. Perundingan (Consultation): Pihak luar berkonsultasi dan berunding dengan

masyarakat melalui pertemuan atau public hearing dan sebagainya. Komunikasi dua arah, tetapi masyarakat tidak ikut serta dalam menganalisis atau mengambil keputusan;

4. Plakasi/Konsiliasi (Placation/Consiliation): Masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan yang biasanya sudah diputuskan sebelumnya oleh pihak luar, terutama menyangkut hal-hal penting. Mereka mungkin terbujuk oleh insentif berupa uang, barang, dll;
5. Kemitraan (Partnership): Masyarakat mengikuti seluruh proses pengambilan keputusan bersama dengan pihak luar, seperti studi kelayakan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dll. Partisipasi merupakan hak mereka dan bukan kewajiban untuk mencapai sesuatu. Ini disebut “partisipasi interaktif.”;
6. Mobilisasi dengan Kemauan Sendiri (Self Mobilization): Masyarakat mengambil inisiatif sendiri, jika perlu dengan bimbingan dan bantuan pihak luar. Mereka memegang kontrol atas keputusan dan pemanfaatan sumber daya; pihak luar memfasilitasi mereka.

b) Pemberdayaan Masyarakat

Peran mereka dalam menjaga kelestarian kawasan semakin meningkat disaat menjalin hubungan kerja sama dengan pihak TNK. Masyarakat merasa bahwa keberadaan mereka dianggap menjadi bagian dari kawasan Taman nasional Kelimutu. Saat belum menjalin kerja sama, masyarakat hanya dilarang, ditegur dan di beri himbauan sehingga keinginan untuk melestarikan kawasan masih sangat minim. Pada saat dibentuk pemberdayaan lalu diberi fasilitas dan dana-dana bantuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, mereka merasa kalau mereka benar-benar diperhatikan dan dipedulikan oleh TNK sehingga mereka memiliki rasa kepedulian terhadap kawasan. Pemberdayaan di Desa Saga Adalah Kelompok

Pemberdayaan Masyarakat Adat Saga yang mengelola biji kopi hasil dari kebun mereka yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional.

c) Kegiatan konservasi alam

Keberadaan desa yang memiliki hubungan erat dengan kawasan Taman nasional sebagai desa penyangga yang memiliki peranan penting dalam membantu menjaga kelestarian konservasi di taman nasional, masyarakat desa sudah melaksanakan kesepakatan konservasi yang telah disepakati dengan pihak taman nasional (Widyagraha dkk, 2022).

Ketergantungan secara ekonomi dan ekologi masyarakat terhadap kawasan konservasi itu adalah nyata. Bagi masyarakat tertentu, hutan bukan hanya bernilai dari aspek ekologi, apalagi hanya dihitung dengan nilai-nilai ekonomi. Sumber daya alam punya ketertarikan sosial-budaya dan penuh dengan spiritual yang sakral. tantangan kedepan dalam mengelola hutan yang menjadi sumber hidup masyarakat sekitarnya adalah menyeimbangkan kepentingan konservasi, dengan kepentingan masyarakat terutama masyarakat sekitar desa penyangga. Dengan lestarnya hutan, fungsi-fungsi lingkungan seperti peran hidrologi, perlindungan tanah dan air, keseimbangan iklim mikro, dan masih banyak peran lingkungan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat di desa penyangga.

Masyarakat Desa Saga juga terlibat dalam kegiatan konservasi untuk kelestarian alam demi keberlangsungan hidup selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan masyarakat Saga setiap tahunnya yaitu menjaga mata air, melakukan penanaman kembali area-area tandus, pengamanan kawasan hutan dengan berpatroli bersama masyarakat

peduli api (MPA), berpatroli bersama masyarakat mitra polhut (MMP), dan kajian potensi flora fauna.

d) Pengembangan desa wisata (Kampung Adat Saga)

Konsep pengembangan desa wisata didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk mencapai kemajuan ekonomi sekaligus kelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan. Dengan cara memadukan tujuan ekonomi dan ekologi agar menjamin kelestarian secara berkelanjutan baru kemudian kegiatan ekonomi dijalankan selaras dengan sistem alam. Pengembangan desa wisata diharapkan tidak hanya meningkatkan perekonomian warga, tetapi juga menjaga kelestarian alam.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Taman nasional Kelimutu sejauh ini berjalan dengan baik. Berdasarkan data hasil penelitian penulis, masyarakat mengaku bahwa mereka mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak Taman nasional Kelimutu karena pengembangan keterampilan dan mata pencaharian berbasis alam juga menjadi bagian dari upaya kelestarian alam berbasis masyarakat dapat membantu masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak lingkungan. Dengan demikian, upaya-upaya kelestarian alam berbasis masyarakat tidak hanya bertujuan untuk menjaga lingkungan alam, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun banyak masyarakat yang mendukung upaya kelestarian alam, terkadang masih terdapat oknum yang kurang bertanggung jawab dalam merusak hutan. Sebagian dari mereka mungkin tidak sepenuhnya sadar akan dampak negatif dari tindakan mereka terhadap lingkungan, sementara yang lain mungkin terdorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak atau kepentingan pribadi. Meskipun demikian, keberadaan oknum-

oknum ini dapat menghambat upaya pelestarian alam yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Penting untuk memahami akar penyebab dari perilaku kurang bertanggung jawab ini dan mencari solusi yang sesuai. Pendidikan dan kesadaran lingkungan yang lebih baik dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi masalah ini. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelestarian alam dan dampak negatif dari aktivitas merusak lingkungan, diharapkan akan ada perubahan perilaku yang lebih positif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan seperti berikut: Aspek-aspek yang mempengaruhi Kelestarian Taman Nasional Kelimutu berupa:

1. Aspek ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program konservasi. Masyarakat yang mengalami kondisi ekonomi yang sulit cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan konservasi karena mereka lebih fokus pada memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebaliknya, masyarakat yang lebih sejahtera secara ekonomi memiliki lebih banyak waktu dan sumber daya untuk terlibat dalam upaya kelestarian alam.
2. Aspek sosial mempengaruhi pola konsumsi dan perilaku terhadap lingkungan. Nilai-nilai, norma, dan struktur sosial dalam masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk pola konsumsi dan perilaku terhadap lingkungan.
3. Aspek budaya memainkan peran penting dalam memelihara tradisi lokal yang berhubungan dengan kelestarian alam.

Nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik budaya turun-temurun dapat menjadi pendorong atau penghambat dalam upaya kelestarian alam. Masyarakat yang memiliki tradisi budaya yang kuat yang mendukung konservasi alam cenderung lebih aktif dalam menjaga lingkungan alam sekitar mereka.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang tepat yaitu:

1. Bagi masyarakat agar berperan aktif, menggunakan sumberdaya secara bertanggung jawab, serta meningkatkan kesadaran peduli lingkungan agar tercapainya kelestarian alam Taman nasional Kelimutu.
2. Bagi pihak Taman Nasional Kelimutu diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya pengelolaan untuk mencapai kelestarian Taman nasional Kelimutu dan juga mengadakan forum dialog dan konsultasi secara berkala antara pihak taman nasional dan masyarakat lokal. Forum ini dapat menjadi wadah untuk berbagi informasi, mendengarkan masukan dari masyarakat, dan merencanakan kegiatan bersama untuk kelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. (2018). "Dinamika Kepatuhan terhadap Adat di Masyarakat Lokal Flores Timur." *Jurnal Kajian Antropologi*, 15(2), 123-138.
- Eryani, I.G.A.P., Ardantha, I.M., Sinartha, I.N. 2009. *Pengaruh Perubahan Iklim Global terhadap Karakteristik Kerusakan Pantai di Kabupaten Badung, Provinsi Bali*. Bali, Indonesia: Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Warmadewa University.
- Cahyani, N., & Prasetyo, A. (2018). "Implementasi Program Edukasi Lingkungan dalam Upaya Pelestarian Taman nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur." *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 8(2), 56-68.
- Eghenter, Cristina., Putera, M. Hermayani., Ardiansyah, Israr. (Ed). (2012). *Masyarakat dan Konservasi: 50 Kisah yang Menginspirasi dari WWF untuk Indonesia*. Jakarta: WWF-Indonesia.
- Hafid, Abdul. 2017. *Peran Masyarakat Dalam Kelestarian Kawasan Taman nasional Tambora (Studi Kasus Di Desa Pancasila Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat)*. Skripsi. Jurusan Kehutanan. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mashuri. (2012). *Perwujudan Kosmologi Pada Bangunan Rumah tradisional Toraja*. *LANTING Journal of Architecture*, 1 (1):1-10.
- Nugroho, R., & Wibowo, B. (2021). "Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Taman nasional Kelimutu: Studi Kasus tentang Interaksi antara Pelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal." *Jurnal Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 11(2), 89-102.
- Oktadiani D. 2018. *Interaksi masyarakat yang tinggal di kawasan ub forest dalam penggunaan lahan hutan (Studi Kasus di Dusun Sumberwangi, Desa Donowarih dan Dusun Sumbersari, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.
- Praditya, R., & Nurjannah, N. (2018). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur." *Jurnal*

Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 8(2), 89-102.

Qodriyatun, S. N. 2020. *Peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif*. Kajian 41-54.

Santoso, B., & Hartono, A. (2022). *"Penerapan Kebijakan Konservasi yang Berkelanjutan di Taman nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat."* Jurnal Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 12(1), 34-47.

Sartini. 2018. *Manggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*. Jurnal Filsafat

Setiawan, E. 2021. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman nasional Alas Purwo*. Jurnal Sosiologi USK Volume 15, Nomor 2 Desember 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999. Tentang kehutanan. Jakarta.

Wicaksono, A., & Permatasari, R. (2020). *"Pengembangan Ekowisata Sebagai Alternatif Ekonomi Masyarakat Penyangga Taman nasional Gunung Leuser, Sumatera Utara."* Jurnal Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 10(1), 60-72.

Wahyudi, R. (2019). *"Kepatuhan Masyarakat Lokal terhadap Sistem Adat di Desa Adat Sade, Lombok."* Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(1), 45-60.

Widyagraha, N. G. B., Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. 2022. *Partisipasi Masyarakat Blimbingsari dalam Pelaksanaan Kesepakatan Konservasi Taman nasional Bali Barat*. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(2), 287-293.